

ISU PERUBAHAN IKLIM PADA PERTEMUAN P20 JAKARTA

Teddy Prasetiawan

19

Abstrak

The 8th G20 Parliament Speakers Summit (P20) berlangsung pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta. P20 merupakan forum antarparlemen negara anggota G20. Sebagai penyelenggara P20 ke-8, Indonesia perlu menangkap momentum ini untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Isu lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, diangkat sebagai salah satu isu prioritas P20. Tulisan ini membahas tentang outcome document terkait isu perubahan iklim apa saja yang dihasilkan P20 dan keselarasannya dengan KTT G20. P20 ini dianggap penting karena pengaruh negara G20 sangat besar dalam perekonomian dunia dan mewakili tiga per empat dari total emisi karbon dunia. Meskipun tidak berhasil menyepakati Joint Statement, P20 berhasil menghasilkan outcome document berupa Chair Summary yang tetap diserahkan ke Sherpa sebagai pertimbangan dalam menentukan arah pembahasan KTT G20 dari perspektif parlemen. P20 menjadi momentum bagi DPR RI untuk menjadi contoh lembaga negara yang ramah lingkungan dan rendah jejak karbon serta lebih peka dalam menyikapi isu perubahan iklim melalui fungsi yang dimiliki.

Pendahuluan

G20 merupakan sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang secara kumulatif memiliki pengaruh besar terhadap masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Anggota G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi,

Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (g20.org, 2022).

G20 terdiri dari 11 kelompok kerja (*working group*), 1 kelompok inisiatif (*initiative group*), dan 10 pertemuan tingkat non-pemerintah (*engagement groups*) yang masing-masing tergabung dalam Sherpa yang akan memberikan rekomendasi agenda dan prioritas G20 (p20indonesia.dpr.go.id, 2022). P20 merupakan salah satu dari *engagement groups*. P20 adalah forum yang dihadiri oleh para ketua parlemen negara-negara G20 dan bertujuan untuk membawa dimensi parlementer



ke dalam tata kelola pemerintahan global, meningkatkan kesadaran dan membangun dukungan politik untuk komitmen internasional, dan membantu memastikan bahwa ini diterjemahkan secara efektif ke dalam realitas nasional (g20.org, 2022).

Seiring dengan presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini, DPR RI juga menjadi penyelenggara P20 yang ke-8 yang berlangsung di Jakarta, 5-7 Oktober 2022. P20 kali ini mengambil tema: *Stronger Parliament for Sustainable Recovery*, sejalan dengan tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yaitu: *Recover Together, Recover Stronger*. Ide *recovery* (pulih) dalam kedua tema tersebut tidak hanya berkaitan dengan pandemi Covid-19 saja, tetapi juga atas permasalahan global lainnya seperti krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, dan konflik dunia. Pada prinsipnya, hasil pertemuan wakil parlemen negara G20 ini akan menyepakati *outcome document*, baik berupa *joint statement* atau lainnya, yang melalui Sherpa dikontribusikan pada proses pembuatan kebijakan G20 yang akan tertuang dalam bentuk komunikasi bersama (*joint communique*).

Isu lingkungan mendapatkan perhatian yang besar, baik dalam P20 atau G20. Ini terlihat melalui isu prioritas kedua gelaran tersebut. Tulisan ini membahas tentang *outcome document* terkait isu perubahan iklim apa saja yang dihasilkan P20 dan keselarasannya dengan KTT G20.

Isu Perubahan Iklim dalam P20

P20 memiliki empat isu prioritas, yaitu: (1) Percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau; (2) Keamanan pangan dan energi, dan tantangan ekonomi; (3) Parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis; dan (4)

Inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, G20 memiliki tiga isu prioritas, yaitu: (1) Arsitektur Kesehatan Global; (2) Transformasi Digital dan Ekonomi; dan (3) Transisi Energi Berkelanjutan (p20indonesia.dpr.go.id, 2022). Secara eksplisit isu perubahan iklim dan transisi energi disebutkan dengan istilah yang sedikit berbeda pada isu prioritas P20. Begitu pula dengan isu perubahan iklim pada isu prioritas G20. Namun kedua isu lingkungan ini sebenarnya banyak dibahas dalam P20.

Meskipun hingga akhir P20 parlemen negara G20 tidak berhasil menyepakati *Joint Statement*, P20 tetap menghasilkan *outcome document* berupa *Chair Summary* yang berisi sejumlah pesan yang dapat menjadi pijakan dunia dalam mengatasi berbagai persoalan global yang nantinya akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar bulan November mendatang di Bali. Isi *Chair Summary* P20 kurang lebih hampir sama dengan konsep *Joint Statement* (as per 5 Oktober) yang disiapkan untuk dibahas dalam forum P20, kecuali terkait isu konflik Rusia-Ukraina. Untuk masalah ini, DPR RI sebagai penyelenggara berposisi netral untuk tidak berpihak pada salah satu negara dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai.

Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam dokumen *Chair Summary* P20 untuk isu perubahan iklim, antara lain, *pertama*, percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 diarahkan pada pembangunan yang rendah karbon, tahan terhadap iklim, dan memiliki pendekatan *nature* positif terhadap ekosistem sesuai dengan komitmen global terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Paragraf 5). *Kedua*, tetap menjaga komitmen negara G20 dan mendorong pencapaian target pengurangan emisi

melalui tindakan mitigasi, adaptasi, dan dukungan keuangan dengan tetap berprinsip pada *honouring common but differentiated responsibilities, respective capabilities and in the light of different national circumstances* (Paragraf 6). Ketiga, mendorong parlemen negara G20 untuk memberikan contoh dengan menjadi lebih ramah lingkungan (*greener*) dan menekan jejak karbon (*carbon footprint*) di lingkungan parlemen masing-masing negara (Paragraf 6).

Keempat, mengapresiasi hasil *Conference of the Parties* (COP-26) Glasgow dan *Paris Agreement* serta mendorong aksi yang lebih kuat pada COP-27, di Sharm El-Sheikh, Mesir (Paragraf 6). Kelima, mendesak negara-negara maju untuk sepenuhnya memenuhi komitmen pendanaan perubahan iklim untuk mendukung negara-negara berkembang (Paragraf 6), terutama target pendanaan USD100 miliar yang telah dijanjikan dan untuk memenuhi komitmen lainnya terkait transfer teknologi dalam mencapai target *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dan target adaptasi, strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang, dan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional (Paragraf 7). Keenam, memastikan konservasi, perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan komponennya, serta sumber daya alam lainnya (Paragraf 8).

Butir terkait isu perubahan iklim dalam *Chair Summary* P20 di atas sejalan dengan *Chair Summary* yang dihasilkan oleh *working group Joint Environment and Climate Minister's Meeting* (JECM) yang digelar pada 31 Agustus 2022. Isu terkait lingkungan dan perubahan iklim dibahas lebih teknis menasar pada aksi yang lebih spesifik dengan menekankan pada perlunya meningkatkan usaha semua negara untuk meningkatkan ambisi pengurangan emisi dan menjamin

pencapaian target global yang tertuang dalam *Paris Agreement* dan *Glasgow Climate Pact's* (g20.org, 5 September 2022).

Pentingnya Mengawal Isu Perubahan Iklim dalam P20

Negara anggota G20 tidak hanya memiliki pengaruh sangat besar dalam perekonomian dunia, namun juga berpengaruh pada jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang mewakili tiga per empat dari total emisi karbon dunia. Oleh karena itu momentum P20 dan G20 perlu dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan Indonesia yang mewakili negara-negara berkembang dengan latar belakang sumber daya alam yang melimpah dengan kemampuan pendanaan yang terbatas dalam mencapai target pengurangan emisi (Republika, 7 Oktober 2022).

Sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, komitmen global terhadap isu perubahan iklim dan SDG's mengalami perlemahan. Hal ini dinilai wajar karena dampak Covid-19 yang memperlambat ekonomi dunia menurunkan kemampuan semua negara, termasuk negara maju anggota G20, untuk mengalokasikan bantuan keuangan ke negara-negara target. Mengingat kembali negara G20 melalui jalur parlemen yang memiliki fungsi anggaran dinilai tepat. Peran parlemen yang disadari oleh masing-masing negara dalam forum P20 ini adalah bagaimana parlemen dapat mentransformasikan komitmen global menjadi kenyataan pada tingkat nasional (Media Indonesia, 7 Oktober 2022).

Tidak hanya melalui *Chair Summary* P20, DPR RI juga mengawal isu perubahan iklim

melalui pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela sidang. Tercatat setidaknya ada 14 pertemuan bilateral antara Ketua DPR RI dengan ketua parlemen, antara lain dengan parlemen Inggris, Australia, Singapore, Uni Emirat Arab, China, Azerbaijan, Ukraina, Rusia, Turki, Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, dan India. Dalam setiap pertemuan bilateral tersebut, selain menegaskan tentang hubungan bilateral kedua negara yang selama ini terjalin, Ketua DPR RI juga mengangkat potensi kerja sama bidang lain yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain kerja sama: (1) Ekonomi hijau, melalui investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi; (2) Ekonomi biru, melalui kerja sama kelautan dan perikanan yang lebih optimal; (3) Keamanan pangan, melalui kerja sama dalam hal modernisasi pertanian dan peternakan; dan (4) Perubahan iklim dan transisi energi, melalui tukar pengalaman, program pelatihan, proyek percontohan, pengenalan dan demonstrasi, alih teknologi dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan energi terbarukan.

Sejumlah peluang kerja sama dalam hal alih teknologi dan pendanaan iklim menjadi bahasan dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut. Ini semua dikemas dalam bingkai multilateralisme, yaitu bahwa untuk menyelesaikan permasalahan iklim perlu upaya bersama lintas negara sesuai dengan peran dan potensinya masing-masing. Dengan negara maju, Indonesia lebih mengedepankan bantuan pendanaan iklim dan alih teknologi dalam upaya transisi energi hijau. Sementara itu, dengan sesama negara berkembang, Indonesia lebih menekankan pada

pertukaran informasi dan pengalaman, serta kembali menyatukan kekuatan dan gagasan memperjuangkan hak negara-negara berkembang untuk memperoleh keadilan iklim.

Komitmen DPR RI terhadap Isu Perubahan Iklim

Butir menarik dalam *Chair Summary* P20 lainnya adalah mendorong parlemen negara G20 untuk memberikan contoh dengan menjadi lebih ramah lingkungan dan menekan jejak karbon di lingkungan parlemen masing-masing negara. DPR RI telah mengawali komitmen tersebut melalui penyelenggaraan P20 yang menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional ketua parlemen negara peserta. Tak hanya itu, DPR RI juga menunjukkan aksi dengan penerapan berbagai kebijakan internal yang lebih ramah lingkungan atau *go green*, antara lain dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dukungan administrasi *papperless* dan *zero waste*, dan rencana implementasi *green building* di lingkungan kerja DPR RI.

P20 menjadi momentum bagi DPR RI untuk lebih peka dalam menyikapi isu perubahan iklim melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang melekat padanya. Beberapa agenda legislasi yang masih tertunda, seperti pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, tentu akan menjadi perhatian publik karena menyangkut komitmen DPR RI yang tertuang dalam *Chair Summary* P20. Begitu pula melalui fungsi pengawasan dan anggaran, DPR RI perlu mendorong pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon serta mengingatkan pemerintah agar senantiasa menjaga komitmen terhadap isu perubahan iklim.

Komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global salah satunya adalah melalui target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 42% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 untuk kemudian mencapai *zero emissions* pada tahun 2060. Bahkan menjelang COP ke-27 di Mesir November mendatang, target ini akan ditingkatkan. Hal ini akan disampaikan melalui dokumen NDC Indonesia yang menaikkan target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional (Media Indonesia, 7 September 2022).

Penutup

Pertemuan P20 merupakan momen penting untuk kembali mengingatkan dunia akan pentingnya isu perubahan iklim. Meskipun P20 tidak menghasilkan *outcome document* berupa *Joint Statement*, namun *Chair Summary* sudah cukup mewakili isu prioritas perubahan iklim yang dibutuhkan untuk selanjutnya akan diserahkan ke *sherpa* sebagai pihak yang akan menentukan isu prioritas KTT G20 mendatang. *Chair Summary* P20 dinilai selaras dengan *outcome document* yang dihasilkan oleh *working group* tingkat menteri lingkungan dan perubahan iklim, yaitu dokumen *Chair Summary* JECMM.

Krisis global yang sedang dihadapi, termasuk krisis iklim, perlu ditangani secara bersama-sama secara multilateralisme dengan tetap berprinsip pada *honouring common but differentiated responsibilities, respective capabilities and in the light of different national circumstances* sehingga tujuan agar tidak ada negara yang tertinggal (*no one left behind*) dapat terwujud. Perspektif keparlemenan perlu ditingkatkan dalam membantu

negara mencapai komitmen masing-masing negara melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang diemban.

Dalam Paragraf 6 *Chair Summary* P20 ditegaskan agar parlemen negara G20 memberikan contoh dengan menjadi lebih ramah lingkungan (*greener*) dan menekan jejak karbon (*carbon footprint*) di lingkungan parlemen masing-masing negara. Hal ini menyisakan tanggung jawab bagi DPR RI sebagai penyelenggara P20 ke-8 yang menghasilkan *outcome document* tersebut. Peran DPR RI yang dinanti publik tentu saja tidak hanya sebatas pemanfaatan energi surya, administrasi yang *papperless*, aksi *zero waste*, atau mengimplementasikan konsep *green building* di lingkungan DPR RI. Lebih dari itu, DPR RI diharapkan mampu mengawal komitmen Pemerintah Indonesia yang ambisius sejalan dengan peran parlemen negara G20 dalam mentransformasi komitmen global menjadi kebijakan nasional.

Referensi

- Chair Summary on The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit* (P20), Jakarta, Indonesia, 6 dan 7 Oktober 2022.
- Chair Summary on Joint Environment and Climate Ministers' Meeting Bali*, Indonesia, 31 Agustus 2022.
- "DPR Siap Tunjukkan Komitmen RI Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green", 30 September 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6321308/di-p20-dpr-siap-tunjukkan-komitmen-ri-kurangi-emisi-lewat-konsep-go-green>, diakses 4 Oktober 2022.
- "DPR Bangun Panel Surya Taman Energi, Klaim Tak Pakai APBN", 14 Desember 2021, <https://>

www.cnnindonesia.com/nasional/20211213202119-32-, diakses 4 Oktober 2022.

“Dukungan ‘Green Energy’ dalam Rangkaian Kegiatan P20,” 30 September 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41016/t/Dukungan+Green+Energy+dalam+Rangkaian+Kegiatan+P20>, diakses 7 Oktober 2022.

“Forum Parlemen Bantu Hadapi Krisis melalui Politik”, *Republika*, Jumat, 7 Oktober 2022.

Laman resmi G20, <https://www.g20.org/id/about-the-g20-2/#how>, diakses 4 Oktober 2022.

Laman resmi P20, <https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/405>, diakses pada 4 Oktober 2022.

“P20 ‘Chair’s Summary’ Bentuk Komitmen untuk Dunia yang Lebih Baik”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41150/t/P20+%27Chair%27s+Summary%27+Bentuk+Komitmen+untuk+Dunia+yang+Lebih+Baik>, 7 Oktober 2022, diakses pada 9 Oktober 2022.

“P-20 diharapkan Menjadi Bagian Solusi”, *Media Indonesia*, Jumat, 7 Oktober 2022.

“RI Naikkan Target Penurunan Emisi Karbon”, *Media Indonesia*, Jumat, 7 Oktober 2022.



Teddy Prasetiawan
teddy@dpr.go.id

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Lingkungan ITB pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Teknik Lingkungan ITB pada tahun 2008. Saat ini bekerja sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Peluang Implementasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Indonesia" (2014), "Masa Depan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004" (2015), dan "*Bad Piped Water and Other Perceptual Drivers of Bottled Water Consumption in Indonesia*" (Wire Interdisciplinary Reviews, 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.